



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PERAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DALAM MENDUKUNG KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

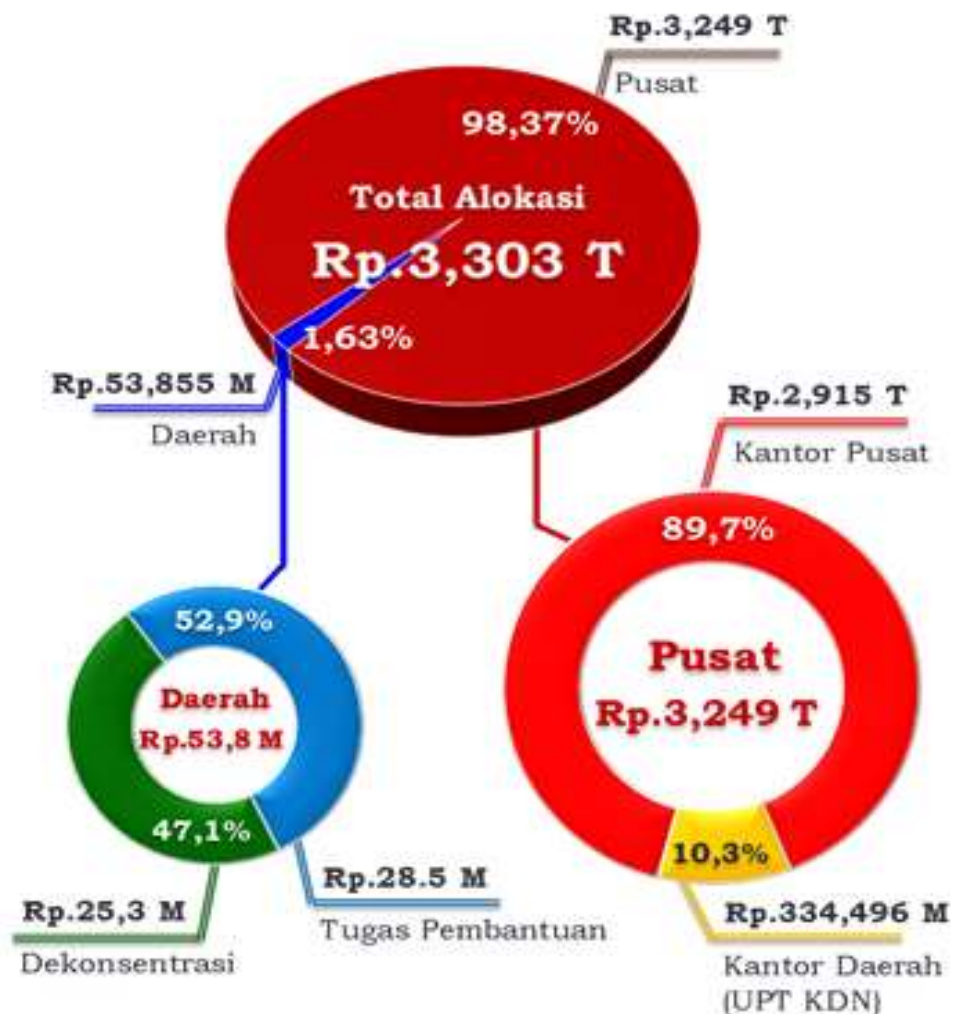
Jakarta, 6 Februari 2018

1

Evaluasi TA.2017

Alokasi Anggaran 2017

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TA. 2017



Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Rekap Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

NO	DEKONSENTRASI		PAGU (RP)	REALISASI	
				Rp.	%
1	2		3	4	5
III	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		24,738,126,000	20,883,464,794	84.42
	3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	12,188,126,000	10,455,986,708	85.79
	3.2	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi	9,000,000,000	7,421,690,587	82.46
	3.3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1,200,000,000	1,097,622,899	91.47
	3.4	Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	2,350,000,000	1,908,164,600	81.20

NO	TUGAS PEMBANTUAN		PAGU (RP)	REALISASI	
				Rp.	%
1	2		4	5	6
I	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		28,505,086,000	27,449,053,166	96.30
	1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara	10,555,086,000	10,311,543,473	97.69
	1.2	Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	17,950,000,000	17,137,509,693	95.47

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DK/TP

LAPORAN MANAJERIAL

LAPORAN PP 39/2006

Meliputi:
Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana,
Pencapaian Target Keluaran, Kendala yang dihadapi
dan Saran tindak lanjut.

LAPORAN PMK 249/2011

Meliputi:
Realisasi penyerapan dana, Konsistensi Capaian
output/keluaran, Efesiensi

LAPORAN KINERJA PermenPANRB No 53/2014

Meliputi:
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS PP 8/2006

Meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Barang Milik Negara

Subtansi Pelaporan PP 39/2006 (e-Monev)






Metode Pelaporan

- BERKALA:** setiap 3 bulan (triwulanan) 6 bulanan (semesteran) dan tahunan
- BERJENJANG:** dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi; dari pengjwb kegiatan kepada pengjwb program, dan dari pengjwb program kepada pimp kementerian/lembaga; atau dari suatu tkt pemerintahan kepada tkt pemerintahan yang lebih tinggi, hingga ke pusat.

Pelaporan Menggunakan Sistem e-Monev Bappenas. Paling lambat 14 hari setelah triwulan berakhir

Status Capaian e- Monev

STATUS CAPAIAN	WARNA	GAP TARGET VS REALISASI (%)		KATEGORI
		TW.1- TW.3	TW.4	
	Hijau	$\leq 0 \%$	$\leq 5 \%$	Baik
	Kuning	$0\% < X < 25\%$	$5\% < X < 25\%$	Hati-hati
	Merah	$X \geq 25 \%$	$X \geq 25 \%$	Buruk

Evaluasi Berdasarkan PP 39/2006

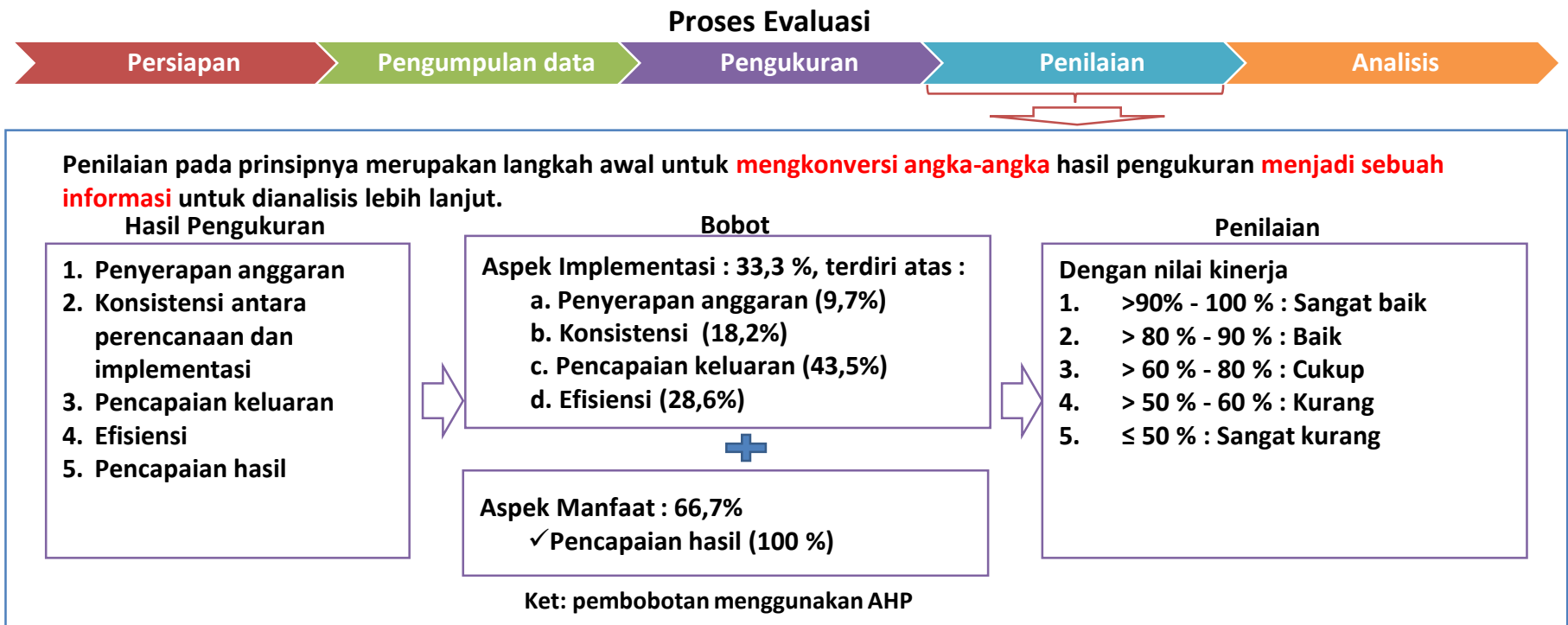
Kode dan Nama Satuan Kerja	Keuangan (Rp)				Fisik (%)		
	Pagu	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status
[049061] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	810.256.000	810.256.000 [100.00]	699.560.150 [86.34]		100.00	100.00	
[079078] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	538.684.000	538.684.000 [100.00]	499.919.949 [92.80]		100.00	99.00	
[089106] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0 [100.00]	680.762.600 [0.00]		100.00		
[099438] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1.354.869.000	1.354.869.000 [100.00]	1.113.367.900 [82.18]		100.00	100.00	
[129074] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	807.100.000	807.100.000 [100.00]	418.284.500 [51.83]		100.00	69.02	
[139078] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	986.380.000	986.380.000 [100.00]	787.129.939 [79.80]		100.00	80.16	
[149072] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	752.876.000	752.876.000 [100.00]	627.091.300 [83.29]		100.00	83.29	
[169185] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	758.755.000	758.755.000 [100.00]	672.498.950 [88.63]		100.00	100.00	
[209071] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	807.251.000	807.251.000 [100.00]	677.781.951 [83.96]		100.00	83.96	
[229068] SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	534.490.000	534.490.000 [100.00]	490.266.400 [91.73]		100.00	100.00	
[419010] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALIMANTAN TENGAH	900.000.000	900.000.000 [100.00]	877.116.600 [97.46]		100.00	100.00	

✓ Dari **60 Satker Penerima DKTP** lingkup Ditjen Bina Adwil berdasarkan Pemantauan berdasarkan PP 39 Tahun 2006, **hanya 11 satker** yang melaporkan kinerjanya di dalam sistem aplikasi e-monev bappenas.

✓ Dari **11 satker** tersebut pencapaian kinerja masih berata-rata berkategori kuning. Satu-satunya pencapaian baik secara realisasi anggaran dan kinerja berkategori hijau hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara **Setda Prov Sumut dan Setda Prov Lampung** mendapat kategori merah.

Aspek Evaluasi Kinerja



- ❑ Dalam PMK ini yang melakukan evaluasi :
- Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan lingkup kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
 - Evaluasi dilakukan **per Program**;
 - Dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi kinerja kepada pimpinan eselon I atau pejabat lain sebagai penanggung jawab program;
 - Melibatkan pihak lainnya.

MULAI TAHUN 2015 INPUT MELALUI APLIKASI SMART (PMK 249/2011) CAPAIAN DI INPUT SECARA BERKALA/BULANAN

Evaluasi Berdasarkan PMK 249/2011

NO	Nama Satker	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	82.35	100.00	100.00	17.65	96.61
2	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	82.72	99.99	100.00	17.28	96.38
3	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	83.27	100.00	100.00	16.73	96.04
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUPANG	85.77	100.00	100.00	14.23	94.49
5	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	81.42	82.71	100.00	18.58	94.04

Berdasarkan PMK 249/2011, seluruh Satker telah melakukan pelaporan di dalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Penilaian implementasi yang meliputi penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output/keluaran dan efisiensi,

Dari 60 Satker penerima Dekon TP, 5 Satker DKTP dengan penilaian kinerja tertinggi yaitu: BPBD Kab. Lombok Barat, Setda Prov. Sumbar, Setda Prov. Kalteng, BPBD Kab Kupang dan Setda Prov. Kalsel dengan kategori “sangat baik”

NO	Nama Satker	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	95.00	25.08	100.00	5.00	75.15
57	BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	97.05	22.66	100.00	2.95	73.45
58	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	96.71	20.82	100.00	3.29	73.32
59	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU	99.01	22.91	100.00	0.99	72.28
60	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	51.83	30.63	66.67	20.00	68.20

Sementara satker lainnya yang melaporkan capaian outputnya didalam sistem SMART nilai kinerjanya rata-rata masih berada diantara 70% -80%.

Satu-satunya Satker yang berada **dibawah 70%** adalah **Setda Prov. Lampung**.

Pemantauan Satuan Kerja Berdasarkan PMK 249/2011

NO	Nama Satker	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	82.35	100.00	100.00	17.65	96.61
2	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	82.72	99.99	100.00	17.28	96.38
3	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	83.27	100.00	100.00	16.73	96.04
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUPANG	85.77	100.00	100.00	14.23	94.49
5	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	81.42	82.71	100.00	18.58	94.04
6	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	79.80	77.69	100.00	20.00	93.98
7	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	86.34	95.93	100.00	13.66	93.40
8	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	89.13	100.00	100.00	10.87	92.42
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEEROM	91.60	100.00	100.00	8.40	90.89
10	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	83.96	70.94	100.00	16.04	90.32
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO	92.87	100.00	100.00	7.13	90.11
12	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	78.69	55.04	100.00	20.00	89.75
13	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	88.63	81.45	100.00	11.37	89.35
14	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	87.12	76.19	100.00	12.88	89.33
15	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	94.40	100.00	100.00	5.60	89.16
16	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	88.84	80.47	100.00	11.16	89.04
17	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	94.74	100.00	100.00	5.26	88.95
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GORONTALO	83.12	60.13	100.00	16.88	88.88
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMPANG	95.38	100.00	100.00	4.62	88.56
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI	96.08	100.00	100.00	3.92	88.12

NO	Nama Satker	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	96.61	100.00	100.00	3.39	87.80
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	97.89	100.00	100.00	2.11	87.00
23	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	97.95	100.00	100.00	2.05	86.97
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA	97.95	100.00	100.00	2.05	86.97
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE	98.15	100.00	100.00	1.85	86.84
26	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	98.30	100.00	100.00	1.70	86.75
27	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	98.31	100.00	100.00	1.69	86.74
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA	98.37	100.00	100.00	1.63	86.71
29	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	66.48	42.03	100.00	20.00	86.20
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN YALIMO	99.48	100.00	100.00	0.52	86.02
31	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	84.63	48.22	100.00	15.37	85.77
32	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	99.41	97.74	100.00	0.59	85.65
33	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	94.02	70.18	100.00	5.98	83.97
34	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	96.62	78.96	100.00	3.38	83.96
35	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	95.24	73.17	100.00	4.76	83.76
36	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	91.73	59.34	100.00	8.27	83.41
37	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	92.80	61.19	100.00	7.20	83.09
38	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	43.59	31.06	100.00	20.00	81.98
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LANNY JAYA	97.12	69.26	100.00	2.88	81.89
40	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	65.76	14.38	100.00	20.00	81.10

NO	Nama Satker	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
41	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	92.16	46.23	100.00	7.84	80.76
42	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	60.46	13.23	100.00	20.00	80.37
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI	99.25	63.98	100.00	0.75	79.61
44	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	93.38	41.85	100.00	6.62	79.21
45	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	93.13	39.84	100.00	6.87	79.00
46	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	56.60	7.64	100.00	20.00	78.98
47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BINTAN	94.82	45.10	100.00	5.18	78.91
48	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. DONGGALA	99.50	56.43	100.00	0.50	78.08
49	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	95.00	40.87	100.00	5.00	78.03
50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	98.11	48.24	100.00	1.89	77.45
51	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN ROTE NDAO	99.18	49.90	100.00	0.82	77.09
52	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. KUPANG	99.42	43.10	100.00	0.58	75.70
53	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	99.61	43.12	100.00	0.39	75.59
54	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU	96.21	30.30	100.00	3.79	75.36
55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALTENG	98.20	37.08	100.00	1.80	75.36
56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	95.00	25.08	100.00	5.00	75.15
57	BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	97.05	22.66	100.00	2.95	73.45
58	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	96.71	20.82	100.00	3.29	73.32
59	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU	99.01	22.91	100.00	0.99	72.28
60	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	51.83	30.63	66.67	20.00	68.20

2

Rencana Kerja TA.2018

RPJMN 2015-2019



Tahun keempat yang harus berkesinambungan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabinet Kerja

“NAWA CITA”

Tahun Anggaran 2018

Tahun keempat yang harus berkesinambungan dalam rangka memperkuat peran Kemendagri

**“SEBAGAI POROS PENYELENGGARAN
PEMDAGRI DAN POLDAGRI,
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK,
MENEGAKKAN DEMOKRASI
DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA”**



**RENSTRA KEMENDAGRI
2015-2019**

Visi Dan Misi, Serta Tujuan Menengah Kemendagri 2015-2019

VISI:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI
POROS

Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
Meningkatkan Pelayanan Publik,
Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa

Visi diwujudkan melalui 5 (Lima) Misi, meliputi:

- 1** Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- 2** Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- 3** Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- 4** Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- 5** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Tujuan Jangka Menengah



Dilaksanakan dengan Mekanisme:

Kegiatan pembinaan & koordinasi di Kantor Pusat

Kegiatan pembinaan & koordinasi di Kantor Daerah (UPT)

Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK)

Mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Arah Kebijakan APBN Kemendagri Tahun 2018

Peran Strategis

Kemendagri harus mampu menjadi **POROS**:

1. Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik,
3. Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.

Arah Kebijakan TA 2018 (*Penjabaran Visi dan Misi Presiden RI*)

- 1 Memantapkan wawasan kebangsaan, demokratisasi, dan stabilitas politik dalam negeri di tahun 2018.
- 2 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, hubungan pusat-daerah, serta adminduk.
- 3 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
- 4 Mendorong terwujudnya keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah, serta memperkuat desa.
- 5 Mendorong daya saing daerah melalui inovasi dan produktivitas daerah.
- 6 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif.

Nawacita

1. Negara hadir;
2. Membangun dari pinggiran; dan
3. Revolusi Mental.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018:

"Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"

Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

Revolusi
Mental

Kesetaraan
Gender

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (al. Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi


PRIORITAS KHUSUS

Asian Games dan Asian Para Games

Pembangunan
Berkelanjutan
dan Perubahan
Iklim

Pemerataan

Tata kelola
Pemerintahan
yang Baik

 =Pengarusutamaan/
Mainstreaming

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

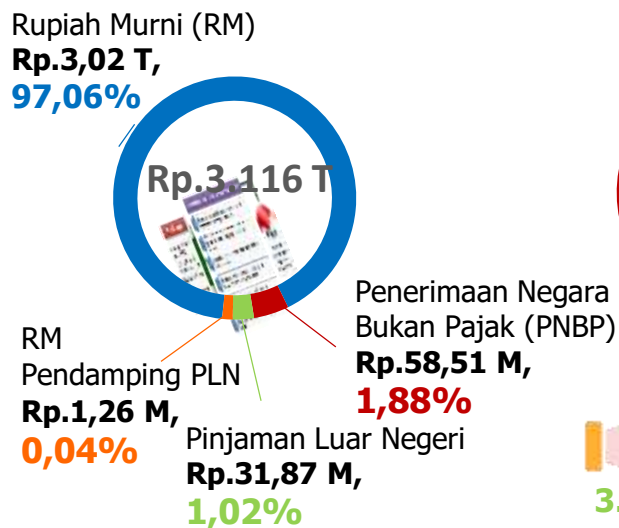
Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri Dalam RKP Tahun 2018

Berdasarkan RKP Tahun 2018, Kemendagri mendapatkan penugasan pada 9 Prioritas Nasional, yaitu:

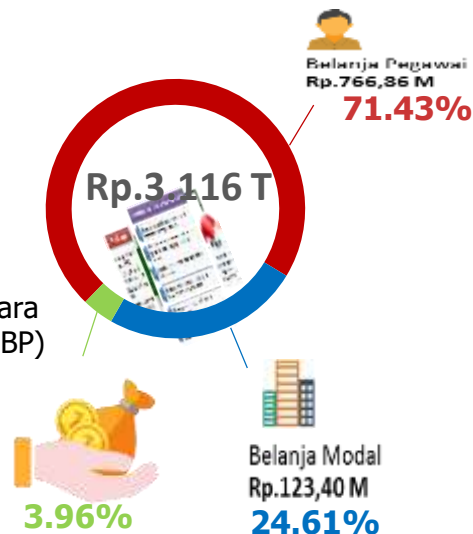


Komposisi Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri Tahun 2018

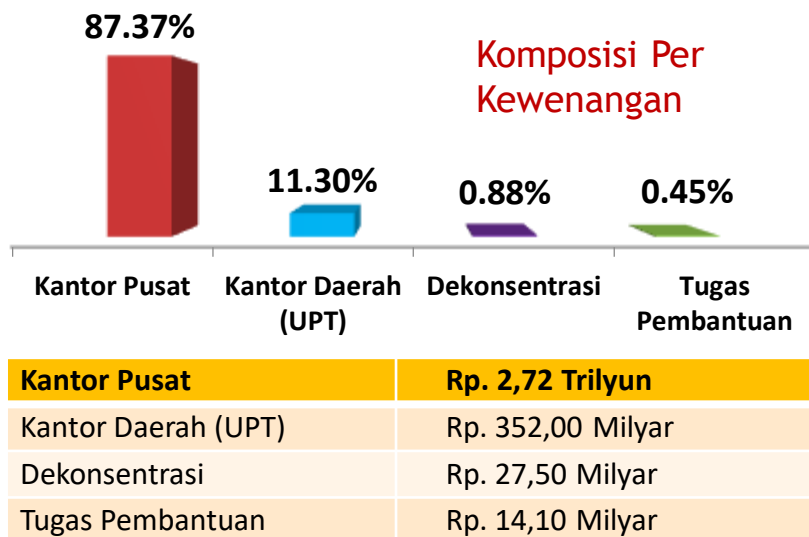
Komposisi Per Sumber Dana



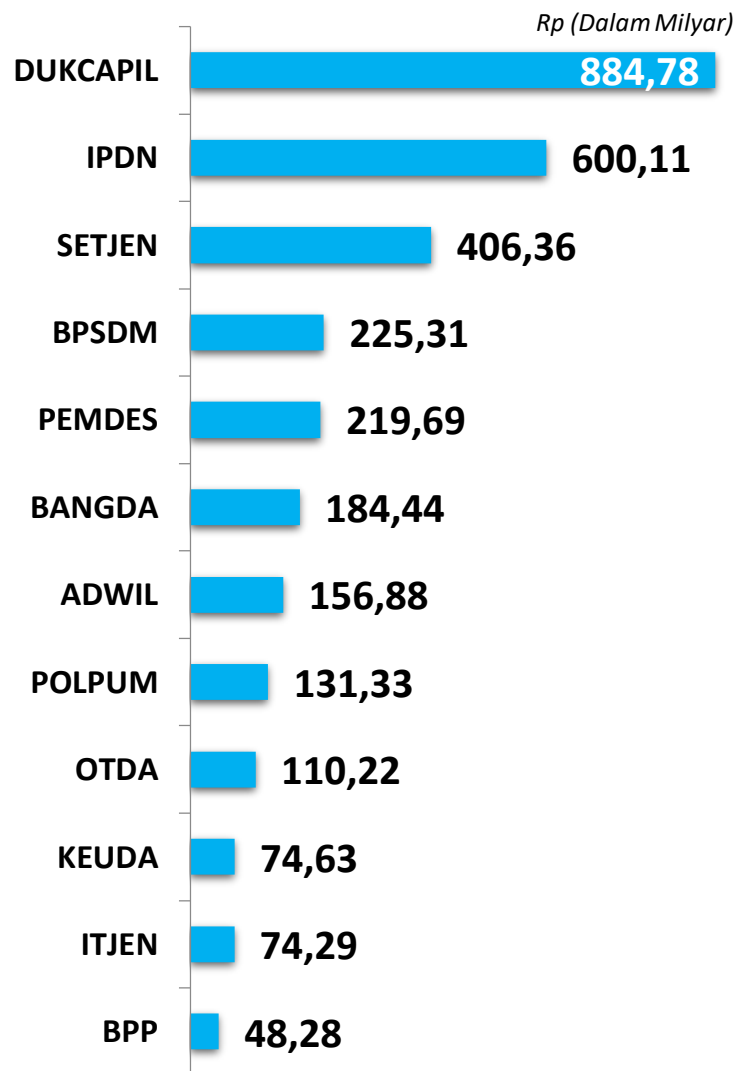
Komposisi Per Jenis Belanja



Komposisi Per Kewenangan



Komposisi Per Komponen



DK = Rp.27.500.000.000,-
TP = Rp.18.900.000.000,-

3 Keg DK
3 Keg TP

DITJEN BINA ADWIL

DK = Rp.15.000.000.000,-
TP = Rp.17.000.000.000,-

DITJEN BINA BANGDA

TP = Rp.1.900.000.000,-

BPSDM

DK = Rp.12.500.000.000,-

Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kemendagri TA.2018

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Dekonsentrasi	Pagu (Rp.)	Lokasi
Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	9.000.000.000	34 Provinsi
Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	6.000.000.000	16 Provinsi

Tugas Pembantuan	Pagu (Rp.)	Lokasi
Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	12.000.000.000	8 Kab pada 7 Provinsi
Pembangunan Sarpras (gudang logistik/pusdalop) di daerah rawan bencana	5.000.000.000	6 Kab pada 5 Provinsi

BADAN PENGEMBANGAN SDM

Dekonsentrasi	Pagu (Rp.)	Lokasi
Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	12.500.000.000	31 Provinsi

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas Pembantuan	Pagu (Rp.)	Lokasi
Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah	1.900.000.000	2 Kab pada 2 Provinsi

Dukungan Kegiatan pada Kinerja Kemendagri Tahun 2018 (1)

- Mendukung pencapaian peran gubernur dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 34 Provinsi
- Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
- Mendukung tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan



DK Peningkatan Peran
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah



Rp.9.000.000.000,-
(34 Provinsi)

- Mendukung pencapaian target Prioritas Nasional Penerapan PTSP Prima di 51 Kab/Kota
- Menciptakan pelayanan publik yang prima, terutama kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu



DK Asistensi Penyelenggaraan
PTSP Prima di Daerah



Rp.6.000.000.000,-
(16 Provinsi)

Dukungan Kegiatan pada Kinerja Kemendagri Tahun 2018 (2)

- Mendukung pencapaian target Prioritas Nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarpras di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara di 7 Daerah perbatasan antar negara
- Memenuhi kebutuhan sarpras untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara



TP Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar



Rp.12.000.000.000
(8 Kab pada 7 Prov)

- Melaksanakan tugas Kemendagri dalam koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarpras serta tanggap darurat dan pasca bencana
- Untuk mendukung peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya mitigasi bencana melalui pembangunan kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan penyediaan gudang logistik di 6 daerah rawan bencana



TP Pembangunan Sarpras (gudang logistik/pusdalop) di daerah rawan bencana



Rp.5.000.000.000
(6 Kab pada 5 Prov)

1. LAKSANAKAN SEDINI MUNGKIN

Penuhi syarat administratif, lelang lebih awal, Juknis lebih awal, susun Rencana Penarikan dan laksanakan secara konsisten

2. TINGKATKAN AKUNTABILITAS

Agar transparan, taat azas, hindari pemborosan, hindari potensi korupsi, kolusi, manipulasi, tidak menunda proses hibah BMN

3. INTENSIFKAN MONEV

Lakukan pendampingan secara langsung kepada Unit Kerja Pelaksana termasuk DKTP

4. TINGKATKAN KOMPETENSI SDM

Tingkatkan kapasitas aparatur pengelola anggaran Pusat dan Daerah

5. INTENSIFKAN KOORDINASI

Agar sinergi antara Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan DKTP

6. EFEKTIFKAN PELAPORAN

- ✓ Setiap Satker penerima DKTP wajib menyusun perjanjian kinerja (berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014).
- ✓ Setiap Satker Penerima DKTP wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana DKTP secara aspek Akuntabilitas (laporan keuangan dan Simak BMN)
- ✓ Setiap Satker penerima DKTP wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana DKTP secara aspek manajerial (PP 39/2006, PMK 249/2011 dan Permenpan 53/2014) secara periodik (bulanan dan triwulanan) dan berjenjang dari OPD pelaksana kegiatan sampai dengan Eselon I pembina pelaksana DKTP, melalui Aplikasi E-monev Bappenas dan SMART Kemenkeu.
- ✓ **Penilaian Kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi capaian kinerja kegiatan DKTP, apabila capaian kinerja DKTP rendah maka capaian kinerja Kemendagri rendah.**



TERIMA KASIH